



RENSTRA

SEKRETARIAT DPRD

KAB. MAGELANG

TAHUN 2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Kota Mungkid, 19 September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. ARI HANDOKO, MM
Pembina Utama Muda
19730525 1993001 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	34
BAB III	39
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	48
3.2 Strategi.....	51
3.3 Arah Kebijakan.....	52
BAB IV	54
4.1 Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	54
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BDANG URUSAN	72
4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	72
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci	74
BAB V	76



DAFTAR TABEL

		Hal	
1	Tabel 2.1	Data Personal dan Tata Laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	21
2	Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	22
3	Tabel 2.3	Daftar Aset Sekretariat Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024	25
4	Tabel 2.4	Daftar Aset Sekretariat Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024	29
5	Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pagu Anggaran Program Tahun 2019-2024	31
6	Tabel 2.6	Capaian Standar Pelayanan Minimal	32
7	Tabel 2.7	Capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD	32
8	Tabel 2.8	Capaian indikator kinerja kunci	32
9	Tabel 2.9	Simpulan Isu Strategis Sekretariat DPRD	35
10	Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	51
11	Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	51
12	Tabel 3.5	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	53
13	Tabel 4.2	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	44
14	Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra PD	58
15	Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
16	Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. MAgelang	68



DAFTAR GAMBAR

		Hal	
1	Gambar 1.1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
2	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	20
3	Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	25
4	Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	50
5	Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Sekretariat DPRD menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan penunjang. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan. Pembangunan di bidang pemerintahan bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Maksud disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Sekretariat DPRD
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029.

- d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
- f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD .
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD disertai dengan evaluasi capaian pelaksanaan urusan lima tahun terakhir sejak 2020 sampai dengan 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD.

Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Kinerja pelayanan perangkat daerah
 - 2.1.3 Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.4 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - 2.1.5 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - 2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
 - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis
- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
- 3.1 Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
 - 3.2 Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
 - 3.4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 3.1 Uraian program
 - 3.2 Uraian kegiatan
 - 3.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
 - 3.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah



- 3.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 3.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ialah membantu Bupati menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang mempunyai:

a. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang melaksanakan fungsi, antara lain:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan peraturan daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Verifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan Pembangunan / pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
- pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan

pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD;
- pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut

a. Sekretaris DPRD;

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.

Bagian Umum dalam tugasnya melaksanakan fungsi:

- 1) Penatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

- 3) Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang meliputi: orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyusunan program kerja DPRD;
- 5) Perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang DPRD;
- 6) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 7) Pelaksanaan keprotokolan;
- 8) Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 9) Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana DPRD;
- 10) Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- 11) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bagian Umum;
- 12) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum.

Bagian Umum membawahi:

1. Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi; Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi melaksanakan tugas surat-menyurat, naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, administrasi kepegawaian, penyusunan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan administrasi kepegawaian, analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahli, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD penyusunan program kerja DPRD, perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang DPRD Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pelaksanaan keprotokolan, penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugas pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD, pengaturan dan pemeliharaan halaman, taman di kompleks Sekretariat DPRD, pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks sekretariat DPRD dan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan, pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, distribusi dan pengendalian bahan perlengkapan, perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, penyediaan, pengurusan, penyimpanan, pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, pengaturan

pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD dan pemeliharaan sarana prasarana dan gedung.

c. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD. Bagian Program dan Keuangan dalam tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 2) evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 4) verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 5) penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 6) penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 7) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 8) pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 9) verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 10) pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 11) evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 12) penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD

- 13) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bagian Program dan Keuangan;
- 14) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Program dan Keuangan; dan
- 15) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Program dan Keuangan membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
Subbagian Perencanaan dan Penganggaran melaksanakan tugas penyusunan bahan perencanaan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD.
2. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
Subbagian Verifikasi melaksanakan tugas pemverifikasian terhadap keuangan, pertanggungjawaban keuangan, koordinasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Uang Persediaan/Ganti Uang/Pembayaran Langsung/Pembayaran Langsung, perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD, perencanaan penatausahaan keuangan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan, koordinasi PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, analisa laporan keuangan, laporan kinerja dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas dukungan legislasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2) Pasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda inisiatif;
- 4) Verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan perundang- undangan,
- 5) Pengumpulan bahan penyiapan raperda inisiatif;
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah rapat;
- 7) Pengoordinasian pembahasan raperda;
- 8) Verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- 9) Verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- 10) Penyusunan tata tertib DPRD;
- 11) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 12) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan;
- 2) Fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan APBD/APBDP;
- 3) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan perkiraan enam bulan berikutnya;
- 5) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
- 6) Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- 7) Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 8) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 9) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 10) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 11) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;



- 12) Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
- 13) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
- 14) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Berikut gambar struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PAN GKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D 3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2						1					1			1	1
Eselon 3															
Kabag						2					2			2	2
Eselon 4					2	1				2	1				2
Non Eselon															
Penelaah Teknis Kebijakan				2	4					6					
Pengolah Data & Informasi	1			1	2				2	2					
Pengadministrasi Perkantoran	2								1	1					
Perancang peraturan Perundang-undangan						1				1					
Analisis Hukum					2					2					
Pranata Komputer				2						2					
Pengelola Layanan Operasional	1									1					
Pranata Humas			1		1				1	1					
Arsiparis Terampil				1					1						

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PAN GKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D 3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Operator Layanan Operasional	3								3						
Pengelola Keprotokolan				1					1						
Analisis Kebijakan					2	1				3					

Sumber : Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Publikasi
Sekretariat DPRD Bulan Agustus 2025

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	370 M ²	53.650.000	Pos penjaga Rumah Dinas DPRD
	Tanah Bangunan Rumah Negara tanpa Golongan	2.160 M ²	61.806.720	Rumah Dinas Ketua DPRD
2.	Gedung			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.491 M ²	3.987.091.892 ,-	Gedung Kantor Set. DPRD Komplek Pemda
	Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan III tipe a permanen	588,78 M ²	1.544.148.100	Gedung Rumdin Ketua DPRD

	Bangunan Gedung Sarana Pelengkap Permanen	348 M ²	5.071.318.810	Gedung DPRD Split Anggaran
	Gedung untuk Pos jaga Permanen	32 M ²	28.000.000	Pos Penjagaan Pintu Masuk Gedung DPRD
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11,34 M ²	14.790.000	Pos penjaga Rumah Dinas DPRD
	Bangunan gedung sarana pelengkap permanen	525 M ²	48.254.850	Taman Halaman Kerai Payung, Glodokan Tiang (Split Anggaran
	Bangunan Gedung Sarana Pelengkap Permanen	32 M ²	41.600.000	Parkir Motor Rangka Besi Penutup Polikarbonat (Split Anggaran)
	Bangunan Gedung Sarana Pelengkap Permanen	12 M ²	22.881.000	Tempat Wudhu Gedung Baru
	Monumen Tugu Peringatan Baleho	6 M ²	36.670.000	Baleho
3.	Alat-Alat Angkutan			
	Kendaraan Roda 4	11 Unit	3.595.682.000	
	Kendaraan Roda 2	11 Unit	216.274.150	
4.	Alat-Alat Perkantoran			
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Rapat	70 Unit	70.000.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat	8 Unit	4.800.000	
	alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja 1/2 Biro	27 Unit	17.500.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meubliair .Meja Kayu / Rotan	11 Unit	6.600.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2 Unit	1.400.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kayu	142 Unit	42.600.000	R. Paripurna
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meubelair Lemari Kayu	26 Unit	26.000.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meubliair Lemari Kayu	8 Unit	16.000.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meubliair Lemari Kayu	8 Unit	12.000.000	
	Alat kantor dan rumah tangga.lemari kaca	1 Unit	3.920.000	Rumdin
	Alat kantor dan rumah tangga.mesin ketik manual standard (14-16 inci)	10 Unit	7.750.000	



Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tempat Tidur Kayu	58 Unit	4.368.000	Rumdin
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Panjang	1 Unit	600.000	Rumdin
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Microphone	47 Unit	11.750.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kipas Angin	4 Unit	2.800.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Kantor Lainnya.Lain-Lain	1 Unit	6.000.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat	74 Unit	30.118.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Es	2 Unit	5.905.000	
Alat kantor dan rumah tangga alat pendingin ac unit	27 Unit	196.462.212	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kipas Angin	7 Unit	5.430.000	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Lain-Lain	5 Unit	26.365.635	
alat kantor dan rumah tangga lemari buku untuk perpustakaan	12 Unit	55.200.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Rapat	4 Unit	15.800.000	
Alat Komputer Pc Unit	9 Unit	78.534.520	
Alat Komputer Note Book	15 Unit	156.529.005	
Alat Komputer.Peralatan Mini Komputer .Printer	4 Unit	7.445.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga Filing Cabinet Besi	5 Unit	12.995.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat	77 Unit	185.378.600	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Lain-Lain	7 Unit	43.010.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Telepon	4 Unit	2.000.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Rapat	269 Unit	317.574.000	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Power Supply Microphone	5 Unit	15.000.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Putar	8 Unit	3.880.000	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Tamu	2 Unit	6.690.000	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	8 Unit	70.844.600	

	Peralatan Studio Visual Proyektor + Attachment			
	Alat kantor dan rumah tangga.AC. Split	16 Unit	79.900.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bangku Tunggu	10 Unit	4.000.000	
	Alat kantor dan rumah tangga. Meubliair .meja biro	4 Unit	18.000.000	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Jam Elektronik	8 Unit	3.840.000	
	alat studio komunikasi dan pemancar.uninterruptible power supply (ups)	6 unit	16.986.174	
	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Peralatan Studio Visual Microphone Table Stand	42 Unit	51.690.000	
	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Alat Komunikasi Telephone.Microphone	38	23.145.000	
	alat kantor dan rumah tangga dispenser	5 unit	5.469.064	

Tabel 2.3

Daftar Aset Sekretariat Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2024

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1	Aset Tetap	23.838.907.731,00
	- Tanah	115.456.720,00
	- Peralatan Mesn	12.539.497.919,00
	- Gedung dan Bangunan	10.843.544.242,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	340.408.850,00
2	Aset Lainnya	107.500.570,00
	- Aset Tetap Lainnya	107.500.570,00
	Jumlah	23.946.408.301,00

Sumber : KIB 31 Desember 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur

penunjang bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD secara konsisten memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota dewan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peningkatan kinerja pelayanan terlihat dari keberhasilan Sekretariat dalam memfasilitasi rapat-rapat dewan, kunjungan kerja serta pengelolaan administrasi keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dalam aspek pengelolaan administrasi kesekretariatan, Sekretariat DPRD telah mengimplementasikan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan DPRD dilaksanakan dengan standar operasional yang jelas dan terukur. Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi juga semakin ditingkatkan, terlihat dari digitalisasi dokumen dan penggunaan aplikasi manajemen perkantoran yang mempermudah akses informasi bagi anggota dewan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada aspek pengelolaan keuangan dan aset, Sekretariat DPRD telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan, sehingga meminimalisir risiko penyimpangan dan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan. Sekretariat DPRD berperan aktif dalam mengelola aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, baik melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja maupun saluran komunikasi lainnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

No.	Tujuan / Sasaran /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja Program					Realisasi Capaian Kinerja Program					Tingkat Capaian Kinerja Program (Persen)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tujuan 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai AKIP		63,03 (Baik)	65,02 (Baik)	67,01 (Baik) -	69,00 (Baik)	71,00 (Sangat Baik) -	60,33 (Baik)	61,13 (Baik)	62,25 (Baik)	63,04 (Baik)	63,57 (Baik)	95,7	94,0	92,9	91,4	89,5
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Produk-Produk Hukum Daerah	%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106%	106%	100%	100%	100%
	Program 1.1.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	%	na	83%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%	na	120%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran	%	na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	%	na	100%	75%	75%	75%	na	100%	100%	100%	100%	na	100%	133%	133%	133%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	na	na	83%	83%	100%	na	na	100%	100%	100%	na	na	120%	120%	100%
		Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	na	na	100%	100%	100%	na	na	100%	100%	100%	na	na	100%	100%	100%



No.	Tujuan / Sasaran /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja Program					Realisasi Capaian Kinerja Program					Tingkat Capaian Kinerja Program (Persen)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	na	na	75%	75%	75%	na	na	75%	100%	100%	na	na	100%	133%	133%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD	%	na	na	75%	75%	75%	na	na	62%	67%	87,63%	na	na	83%	89%	117%
	Program 1.1.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	%	na	100%	100%	100%	100%	na	na	61,20%	98,82%	81%	na	na	61%	99%	81%
Rata - Rata capaian kinerja program (persen)													na	na	100%	109%	108%	
Predikat Kinerja													na	na	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	





Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pagu Anggaran Program Tahun 2019-2024

No.	Tujuan / Sasaran /Program	Kerangka Pendanaan/Anggaran (Rupiah)					Realisasi Pendanaan/Anggaran (Rupiah)					Tingkat Capaian (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tujuan 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	na	48.891.435.245	52.838.857.000	58.193.498.000	73.334.432.793	na	45.037.264.852	48.963.791.218	52.521.199.087	61.282.762.069	na	92	93	90	84
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	na	48.891.435.245	52.838.857.000	58.193.498.000	73.334.432.793	na	45.037.264.852	48.963.791.218	52.521.199.087	61.282.762.069	na	92	93	90	84
	Program 1.1.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	na	13.851.725.500	15.403.860.000	20.360.166.750	32.252.496.692	na	10.756.096.012	12.438.979.694	15.449.446.172	21.221.366.146	na	78	81	76	66
	Program 1.1.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	na	35.039.709.745	37.434.997.000	37.833.331.250	41.081.936.101	na	34.281.168.840	36.524.811.524	37.071.752.915	40.061.395.923	na	98	98	98	98
Rata - Rata capaian kinerja (persen)												na	90	91	89	83
Predikat Kinerja												na	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.6
Capaian Standar Pelayanan Minimal

-

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.7
Capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Fasilitasi Layanan Produk-Produk Hukum Daerah	NA	106.4 %	100 %	100 %	100 %	

Berdasarkan Tabel 2.7 diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD dilihat dari aspek indikator kinerja utama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah tercapai 100% dengan rumusan persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.8
(Capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
	-	-	-	-	-	-	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang memberikan pelayanan kepada

berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.59 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai penerima layanan utama dalam hal dukungan administratif, fasilitasi dan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi penganggaran Pemerintahan Kabupaten Magelang
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang dalam bentuk dukungan administrasi dan fasilitasi kepemimpinan dewan
3. Alat Kelengkapan DPRD meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini teknis dan administratif
4. Fraksi-Fraksi di DPRD dalam bentuk fasilitasi dan dukungan administratif untuk kegiatan fraksi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam konteks dan fasilitasi hubungan dengan DPRD dan Pemerintah Daerah
6. Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada DPRD dan memberikan informasi mengenai kegiatan DPRD kepada masyarakat.
7. Instansi/Lembaga terkait dalam hal koordinasi dan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD
8. Tenaga ahli/pakar – dalam konteks penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian dan Perbincangan, berkenaan dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dan mendukung kelancaran tugas legislasi, pengawasan dan anggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah ASN dan distribusi yang kurang optimal.
2. Keterbatasan jumlah tenaga administrasi untuk mendukung kegiatan DPRD
3. Distribusi pegawai yang tidak merata antar Bagian
4. Beban yang tidak proporsional karena kekurangan personil
5. Kurang Reward dan Punishment
6. Kurangnya pemahaman ASN terhadap perubahan era digitalisasi

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang antara lain:

Tabel 2.9
Simpulan Isu Strategis Sekretariat DPRD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Dukungan Administratif, keuangan, persidangan dan fasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan tugas Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan serta fasilitator informasi dan koordinasi terkait potensi daerah	Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD	Belum Optimalnya fasilitasi DPRD dalam melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten Magelang khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup.	Belum Optimalnya Fasilitasi pembuatan UU, anggaran, dan pengawasan atas target nasional terkait mitigasi dan adaptif	Belum Optimalnya Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terkait isu lingkungan nasional dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan daerah	Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal	Belum optimalnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD

2.2.1.1 Telaah Renstra K/L

a. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Magelang

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari

Visi

dari



**MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS,
UNGGUL, DAN SEJAHTERA ATAU MAGELANG
ANYAR GRESS**

dan Misi

Bupati dan

Wakil

Bupati

Magelang.

Adapun

Visi dan Misi Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia

2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yaitu memberikan dukungan administratif dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang berkomitmen mendukung Misi kedua yaitu **“Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani”**.

b. Telaah Renstra Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD sebagai legislatif daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD memerlukan dokumen perencanaan yang terarah dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang. Dokumen ini mejadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama periode lima tahun yang akan menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pelayanan dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pendanaan untuk implementasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD direncanakan secara indikatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra diukur melalui indikator kinerja yang mencakup aspek pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan DPRD, pengembangan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana pengembangan sistem informasi, serta

pengelolaan keuangan yang akuntabel. Melalui perencanaan strategis yang matang ini diharapkan Sekretariat DPRD dapat memberikan dukungan optimal terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat DPRD, memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi DPRD terkait pembahasan kebijakan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD bertugas memfasilitasi DPRD dalam melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten Magelang khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup. Melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait penataan ruang serta menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sesuai visi dan misi Kabupaten Magelang.

d. Penentuan Isu Strategis

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Posisi DPRD sejalan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Fungsi Anggaran tersebut disertai fungsi pengawasan terhadap Peraturan

Daerah APBD yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah telah diimplementasikan secara efektif dalam hubungan kepala daerah dan DPRD yang setara, tidak saling menjatuhkan dan bermitra untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Namun demikian fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal untuk dapat mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

Belum optimalnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD menjadi isu strategis dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Magelang periode 2025 - 2029. Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai mitra kerja DPRD yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

“Magelang **Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera**“

atau ***Magelang Anyar Gress***

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Pencapaian Magelang Nyaman dalam lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua

lapisan masyarakat. Pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya.

Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang sehat. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif. Dalam lima tahun ke depan untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi.

Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM.

Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip keadilan dan pemerataan harus diberlakukan untuk semua bidang pembangunan dan seluruh wilayah di Kabupaten Magelang.

Misi secara umum merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kata kunci yang termaktub dalam visi dijabarkan dalam lima misi utama (**Panca Dharma**) sebagai berikut.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kelima misi tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Saat ini, masih terdapat anak-anak usia sekolah di Kabupaten Magelang belum mendapatkan akses pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi yang memadai. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dilakukan dengan revitalisasi fasilitas pendidikan. Dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan hingga mencapai target 2-3 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dukungan sosial keagamaan melalui fasilitasi kegiatan keagamaan berbasis pada tempat ibadah, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam peningkatan SDM. Pembangunan kesehatan antara lain dengan memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat melalui pembangunan rumah sakit serta optimalisasi sarana prasarana dan pelayanan rumah sakit serta memberikan dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui.

Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

melayani. Berdasarkan data tahun 2024 nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 78,96; Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,81 dan Indeks Integritas Nasional (IIN) sebesar 72,37. Pada tahun 2029 diharapkan dapat dicapai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 80,29; Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,17; dan Indeks Integritas Nasional (IIN) sebesar 78,00. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang melayani rakyat.

Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dilaksanakan secara konsekuen dengan beberapa agenda yang mengarah pada upaya perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam rangka mendukung agenda ini, diwujudkan dengan penguatan program digitalisasi proses bisnis dalam pelayanan publik, serta mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik bagi masyarakat umum.

Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat perlu didorong dengan perekonomian berbasis potensi lokal. Kabupaten Magelang memiliki potensi lokal yang besar di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, namun tantangan yang ada saat ini memerlukan intervensi tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, menunjukkan penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yakni tercatat sebesar 13,27 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 12,89 persen di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam produktivitas dan daya saing sektor pertanian yang harus segera diatasi.

Sektor pariwisata di Kabupaten Magelang juga memiliki potensi besar, namun saat ini belum dikelola dengan optimal. Pada tahun 2024, sebagaimana yang disebutkan dalam Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, terdapat 43 objek wisata buatan, 38 objek wisata budaya, dan 99 objek wisata alam yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Data kunjungan tertinggi pada tahun 2024 adalah Candi Borobudur, sebanyak 1.286.029 wisatawan, diikuti oleh Ketep Pass dengan jumlah pengunjung 243.510 wisatawan, serta

Candi Mendut-Pawon sebanyak 49.166 pengunjung. Selain itu, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang masih sangat singkat, hanya 1,59 hari untuk hotel berbintang dan 1,02 hari untuk hotel non-bintang. Kurangnya fasilitas dan aksesibilitas yang merata, serta keterbatasan akses pada pembiayaan formal yang hanya menjangkau 40 persen dari sekitar 500 pelaku wisata, menjadi kendala yang harus diatasi.

Berdasarkan data base Kementerian Koperasi dan UMKM, Jumlah UMKM di Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebanyak 65.757 unit, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses pembiayaan dan proses perizinan. Data dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, dan menunjukkan bahwa hanya sekitar 35 persen dari UMKM yang memiliki akses ke pembiayaan formal, sementara sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Tantangan ini menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM, yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi, yaitu 10,83 persen pada tahun 2024, dengan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baru mencapai 30,2 persen pada tahun 2024. Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kebijakan yang mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan keluarga.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penguatan sektor pertanian melalui integrasi dengan industri pengolahan dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta peluncuran subsidi untuk menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida yang terjangkau. Selain itu, kebijakan ekonomi kerakyatan akan diimplementasikan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan kapasitas UMKM, fasilitasi akses pembiayaan dan perizinan, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Selanjutnya, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial yang komprehensif perlu komitmen untuk mengambil langkah-langkah tegas dan progresif guna mendorong transformasi signifikan di Kabupaten Magelang. Berdasarkan kondisi eksisting tingkat pengangguran Kabupaten Magelang di angka 3,55 persen dan tingkat kemiskinan yang mencapai 10,83 persen pada tahun 2024. Target utama yang ingin dicapai adalah menurunkan angka pengangguran hingga 2-3 persen dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi

6-7 persen melalui kebijakan yang tepat serta program-program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang baru mencapai 18,1 persen, yang masih jauh dari kondisi ideal. Sehingga diharapkan ada peningkatan cakupan hingga 22 persen, guna memastikan para pekerja di Magelang memiliki perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Di sisi lain, dengan mayoritas penduduk Kabupaten Magelang yang beragama Islam, yaitu sekitar 1,31 juta jiwa atau 97,5 persen dari total populasi, menjaga hubungan antar agama yang harmonis tetap menjadi prioritas utama. Upaya ini penting untuk mempertahankan kohesivitas sosial dan membangun masyarakat yang inklusif serta toleran, sehingga Kabupaten Magelang dapat berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan harmonis dalam segala aspek kehidupan. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang dapat meningkat secara signifikan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat perekonomian lokal.

Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah

Misi keempat ini akan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten Magelang. Pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama mengingat cakupan panjang jalan dengan kondisi mantap saat ini mencapai 89,20 persen, namun masih perlu ditingkatkan hingga target 91,52 persen untuk memastikan konektivitas yang merata dan mendukung mobilitas serta distribusi ekonomi di seluruh daerah. Kualitas dan kuantitas perumahan juga menjadi perhatian, dengan 378.533 unit rumah yang tersedia saat ini, namun masih ada kesenjangan yang signifikan untuk mencapai target 466.266 unit pada tahun 2029, yang menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan akses ke hunian layak. Selain itu, akses sanitasi aman di Kabupaten Magelang masih sangat rendah, hanya 1,51 persen, dengan target peningkatan menjadi 19,52 persen pada tahun 2029. Sanitasi yang aman sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur, penyediaan perumahan layak, dan akses sanitasi aman adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang. Dengan memperbaiki dan memperluas jaringan jalan

serta konektivitas digital, dipastikan bahwa semua wilayah terhubung secara merata, mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, percepatan pembangunan perumahan berkualitas melalui inovasi desain dan material ramah lingkungan akan mengatasi kesenjangan hunian, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Akses sanitasi yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut, diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan lingkungan, pengolahan limbah dan sampah, serta manajemen bencana berbasis masyarakat. Data menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang masih perlu peningkatan. Angka IKLH sebesar 69,40 dan Indeks Risiko Bencana/IRB: 97,42 akan kami tingkatkan menjadi 75,13 dan 92,53 - 88,49 pada akhir 2029.

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas lokal akan menjadi platform kebijakan dalam rangka perwujudan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari. Eksplorasi dan eksploitasi SDA yang berlebihan akan membayakan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia serta krisis perubahan iklim merupakan sebuah ancaman yang nyata. Untuk itu, perlu kearifan dan kecermatan dalam aktivitas pembangunan. Selain itu, potensi bencana masih menjadi salah satu perhatian khusus mengingat secara geografis beberapa wilayah Kabupaten Magelang terletak di jalur bencana. Upaya penanggulangan bencana dilakukan dengan cara mengoptimalkan manajemen kebencanaan berbasis komunitas lokal.

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata dengan perangkat daerah penanggungjawab yang melekat pada program tersebut sesuai

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

1. ***Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe*** (misi 1)
 - a. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Umum.
 - b. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama.
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB).
 - d. Fasilitasi bakat minat anak untuk meraih prestasi Akademik dan Non Akademik.
 - e. Program bantuan beasiswa jenjang sarjana untuk pemuda berprestasi berbasis desa.
 - f. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - g. Jaminan Kesehatan bagi tenaga kependidikan Agama.
2. ***Sehat Wargane*** (misi 1)
 - a. Pembangunan Rumah Sakit tipe D.
 - b. Optimalisasi sarana pra sarana dan pelayanan Rumah Sakit.
 - c. Bebas biaya perawatan RS bagi warga ber-KTP Magelang.
 - d. Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui.
 - e. Peningkatan kesejahteraan sopir ambulance desa.
3. ***Makmur Rakyat*** (misi 3 dan misi 4)
 - a. Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi).
 - b. Rekonstruksi jalan tambang.
 - c. Program rumah layak.
 - d. Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM).
 - e. Pengentasan kemiskinan secara terpadu.
 - f. Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem.
4. ***Gemilang Potensine*** (misi 3)
 - a. Program Agroindustri dan Agrotourism (*Agro-Twin*).
 - b. Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
 - c. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif.

- d. Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah.
 - e. Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, *e-commerce*, dan pelaku wisata.
 - f. Fasilitasi potensi dan destinasi wisata berbasis budaya.
 - g. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa.
 - h. Mendorong pasar tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - i. Program Magelang Investasi: Menciptakan iklim investasi yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, tata kelola dan sektor unggulan.
5. ***Ngelayani Birokrasine*** (misi 2)
- a. Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis merit sistem.
 - b. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa.
 - c. Peningkatan mutu pelayanan publik.
 - d. Fasilitasi hukum bagi aparatur pemerintah desa.
 - e. Pembangunan database berbasis desa.
 - f. Jaminan Kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - g. Jaminan Kesehatan bagi BPD, RT, RW.
 - h. Penyelenggaraan ruang aspirasi Bupati di kantor kecamatan.
6. ***Gumregrah Wargane*** (misi 3)
- a. Fasilitasi kegiatan keagamaan.
 - b. Fasilitasi kegiatan kebudayaan.
 - c. Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - d. Pembentukan Unit Trauma Center Kabupaten Magelang.
 - e. Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah.
 - f. Pembangunan Taman Budaya Rakyat (TBR).
 - g. Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga.
 - h. Fasilitasi kegiatan olahraga.
 - i. Fasilitasi atlet olahraga berprestasi.
7. ***Lestari Alame*** (misi 5)
- a. Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi.

- b. Konservasi lingkungan hidup dan sumber air.
- c. Fasilitasi pembentukan Desa tangguh bencana.
- d. Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana.

Untuk mensukseskan program prioritas dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, Bupati Magelang meluncurkan inovasi untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakam Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang juga melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut. Sasaran Program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) adalah masyarakat desil satu dan desil 2 yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Adapun tujuan dari program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) adalah untuk memastikan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran, mengurangi ketimpangan data antara kondisi riil di lapangan dengan data nasional dan menjadi dasar perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, kesehatan, perumahan, energi dan infrastruktur dasar.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sehingga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan kalimat kondisi; dapat diukur untuk jangka waktu lima tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate *outcome*; serta tidak menurunkan indikator tetapi kinerjanya

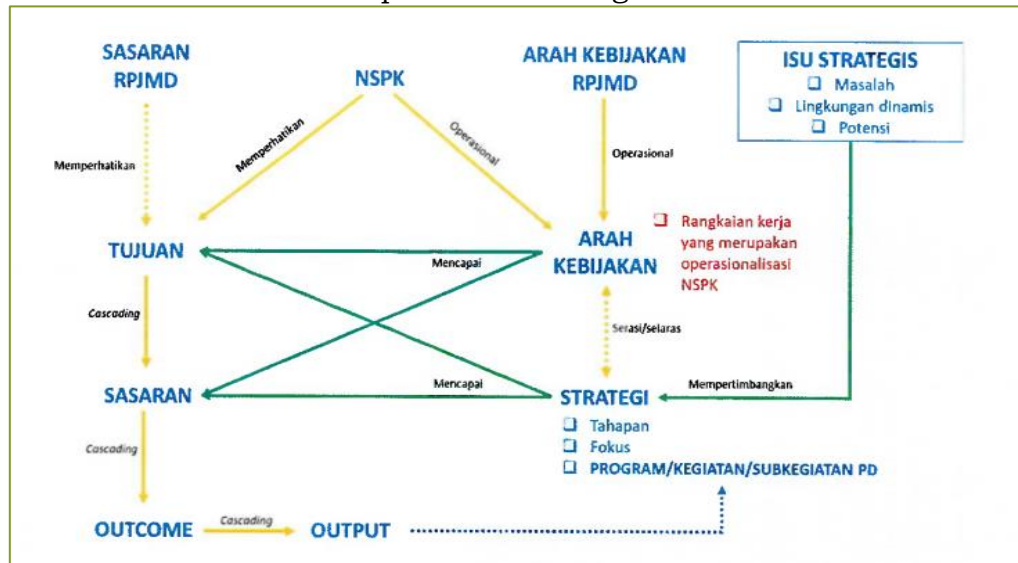
Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Selaras dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 yakni “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” atau Magelang Anyar Gress, dijelaskan Misi kedua adalah akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Harapannya upaya perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda Kabupaten Magelang dapat berjalan baik sampai akhir 2029 melalui peningkatan sumberdaya yang profesional.

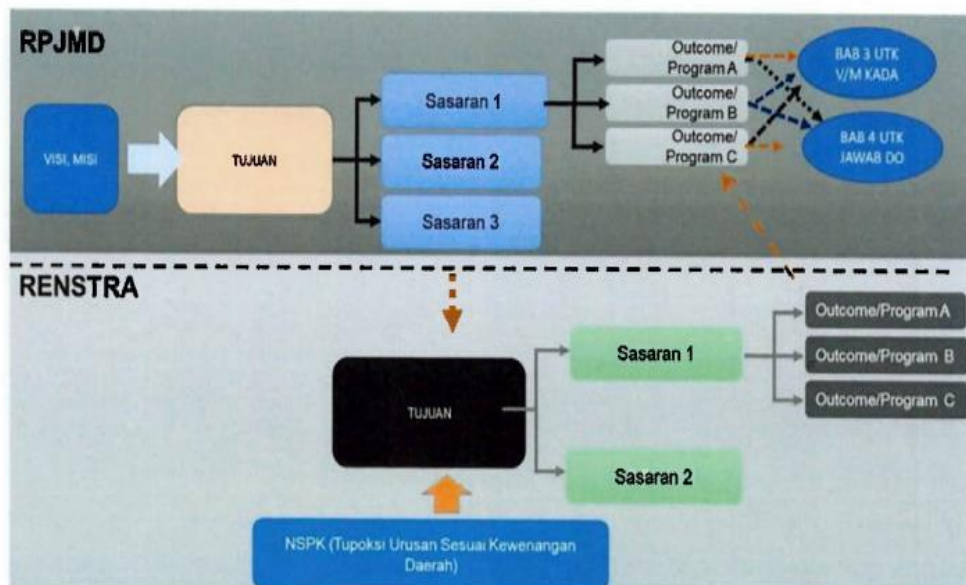
Permasalahan pokok belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memacu Sekretariat DPRD untuk meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat, hal ini diwujudkan dengan Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD		Nilai IKM (Setwan)			88,3	88,74	89,18	88,52	
		Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah.	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
<p>RPJMD</p> <p>PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA</p> <p>(Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital dan</p>	<p>KONSOLIDASI FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA</p> <p>(Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan tata kelola</p>	<p>AKSELERASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA</p> <p>(Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan perekonomian daerah, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, serta</p>	<p>PEMANTAPANPEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA</p> <p>(Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kapasitas saing sumber daya manusia dan pemantapan perekonomian daerah, dengan memantapkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif)</p>	<p>MEWUJUDKAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA</p> <p>(Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan, dan</p>

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
perbaikan tata kelola pemerintahan)	pemerintahan yang bersih melalui penguatan keterampilan, inovasi, dan digitalisasi layanan)	mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif)		memantapkan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat)
SEKRETARIAT DPRD				
Penguatan fondasi kelembagaan dan sistem layanan Sekretariat DPRD	Konsolidasi Fondasi kelembagaan DPRD dengan Pemerintah daerah	Akselerasi transformasi Digital	Pemantapan pelayanan pelayanan publik	Mewujudkan Pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.



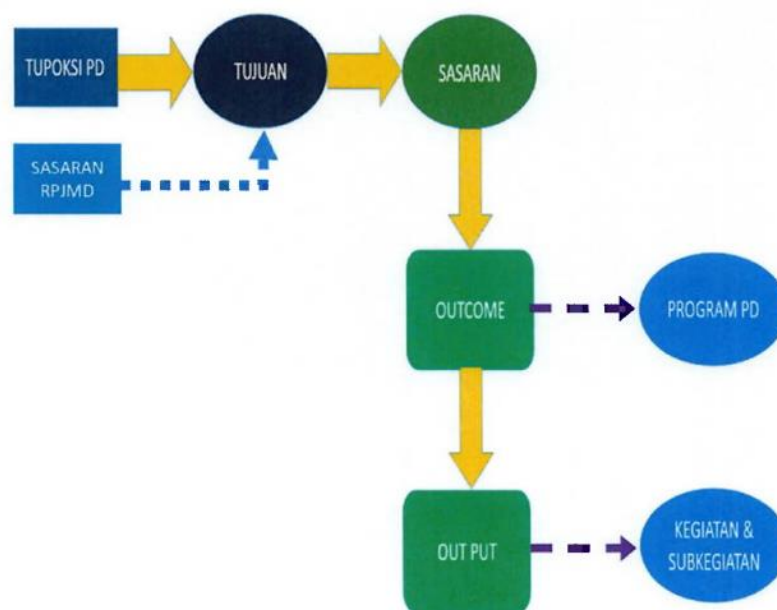
Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah					Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Outcome				Program Pendukung Prioritas	
		Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	(6) Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga legislatif, melalui: Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan strategis, langkah-langkah operasional perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan program dan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Dengan demikian setiap langkah kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program yang menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran yang menunjukkan keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik dalam bentuk angka (Kuantitatif) maupun deskripsi (kualitatif). Indikator ini digunakan untuk melihat



sejauh mana tujuan telah dicapai serta sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, mulai dari masukan (*input*), proses, hasil (*output*), manfaat (*outcome*), hingga dampaknya (*Impact*) sesuai dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 program, 16 Kegiatan dan 53 sub Kegiatan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana tabel 4.1





Tabel 4.2 Rumusan Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD				Nilai IKM		
		Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah.		
					Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perenc, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah selama 1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 tahun	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah ASN yang terlayani administrasi Kepegawaian selama 1 tahun	Jumlah ASN yang terlayani administrasi Kepegawaian	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan selama 1 tahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan selama 1 tahun	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokume Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokume Administrasi Umum PD	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang disediakan selama 1 tahun	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang disediakan selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara selama 1 tahun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Layanan dan Kesejahteraan DPRD selama 1 tahun	Jumlah Paket Layanan dan Kesejahteraan DPRD	Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Keg. Layanan Administrasi DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Fasilitas Fraksi DPRD	
				Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran		
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD		
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD		
				Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD		
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD		
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Keg.Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubaha PPAS kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubaha PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Meningkatnya Kualitas Rekomendasi DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan pengawasan pemerintahan kurun waktu 1 th	Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan pengawasan pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPj kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPj	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		ww	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli kurun waktu 1 th	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Jumlah tenaga fraksi /bulan kurun waktu 1 th	Jumlah tenaga fraksi /bulan	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
				Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Frekuensi Reses DPRD kurun waktu 1 th	Frekuensi Reses DPRD	Pelaksanaan Reses	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Pelaksanaan Kode Etik DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik kurun waktu 1 th	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Peningkatan Kualitas Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	Keg. Fasilitas Tugas DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	



NSPK SASARAN RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Bamusy kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Bamusy	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD kurun waktu 1 th	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	



Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra PD

1	2	3	4										14
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SEKRETARIAT DPRD				40.865.260.816		41.722.316.316		42.632.791.816		42.632.791.816		42.632.791.816	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	91 %	100	3.466.070.274	100	2.633.594.774	100	3.466.070.274	100	3.466.070.274	100	3.466.070.274	
	2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	97 %	100	37.399.190.542	100	39.088.721.542	100	39.166.721.542	100	39.166.721.542	100	39.166.721.542	
Meningkatnya Kualitas Perenc, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah selama 1 tahun	27 Dok	31	10.031.000	31	10.031.000	31	10.031.000	31	10.031.000		10.031.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 tahun	4 Dok	8	9.417.000	8	9.417.000	8	9.417.000	8	9.417.000	8	9.417.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 tahun	23 Dok	23	614.000	23	614.000	23	614.000	23	614.000	23	614.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 tahun	12 Bln	14	5.569.704.542	14	5.569.704.542	14	5.569.704.542	14	5.569.704.542	14	5.569.704.542	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun	12 Bln	34/bulan	5.516.816.542	34/bulan	5.516.816.542	34/bulan	5.516.816.542	34/bulan	5.516.816.542	34/bulan	5.516.816.542	



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Tahun 2026										KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 1 tahun	12	Dok	12 Dok	52.888.000	12 Dok	52.888.000	12 Dok	52.888.000	12 Dok	52.888.000	12 Dok	52.888.000	
Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Layanan dan Kesejahteraan DPRD selama 1 tahun	12	Pkt	3	31.845.155.000	3	33.508.986.000	3	33.586.986.000	3	33.586.986.000	3	33.586.986.000	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50/12	Org/Bln	50/bulan	31.537.455.000	50/bulan	33.279.286.000	50/bulan	33.279.286.000	50/bulan	33.279.286.000	50/bulan	33.279.286.000	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4	Pktr	3	253.700.000	3	175.700.000	3	253.700.000	3	253.700.000	3	253.700.000	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up	44	Org	44	54.000.000	44	54.000.000	44	54.000.000	44	54.000.000	44	54.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah														
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi Kepegawaian			30 Orang	638.055.000	30 Orang	350.000.000	30 Orang	638.055.000	30 Orang	638.055.000	30 Orang	638.055.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	37	12.000.000	37	12.000.000	37	12.000.000	37	12.000.000	37	12.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	26	Org	96	626.055.000	40	338.000.000	96	626.055.000	96	626.055.000	96	626.055.000	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokume Administrasi Umum Perangkat Daerah	47	Dok	37	336.211.700	37	121.328.000	37	264.305.000	37	264.305.000	37	264.305.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama 1 tahun	4	Pkt	150	71.906.700									



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Tahun 2026										KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Bln	12	14.520.000	12	14.520.000	12	14.520.000	12	14.520.000	12	14.520.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bln	12	114.425.000	0	-							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	KI	8	128.552.000	12	100.000.000	12	242.977.000	12	242.977.000	12	242.977.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD selama 1 tahun	4	KI	4	6.808.000	4	6.808.000	4	6.808.000	4	6.808.000	4	6.808.000	
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	1	Lap	5	57.776.000	4	101.906.700	6	129.682.700	6	129.682.700	6	129.682.700	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan selama 1 tahun	-		3	30.576.000	2	20.000.000	3	30.576.000	3	30.576.000	3	30.576.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		1	71.906.700	1	71.906.700	1	71.906.700	1	71.906.700	1	71.906.700	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	unit	2	27.200.000	1	10.000.000	2	27.200.000	2	27.200.000	2	27.200.000	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	12	Lap	24	190.422.000	24	190.422.000	24	190.422.000	24	190.422.000	24	190.422.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	12	Lap	12	16.422.000	12	16.422.000	12	16.422.000	12	16.422.000	12	16.422.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang disediakan selama 1 tahun	12	Lap	12	174.000.000	12	174.000.000	12	174.000.000	12	174.000.000	12	174.000.000	
Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	144		72	1.334.140.074	72	960.472.574	72	1.334.140.074	72	1.334.140.074	72	1.334.140.074	



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya selama 1 tahun	4	Unit	4	319.939.000	4	150.000.000	4	319.939.000	4	319.939.000	4	319.939.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya selama 1 tahun	25	Unit	25	353.728.500	25	150.000.000	25	353.728.500	25	353.728.500	25	353.728.500	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara selama 1 tahun	9	Unit	10	3.108.000	10	3.108.000	10	3.108.000	10	3.108.000	10	3.108.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104	Unit	31	20.523.900	31	20.523.900	31	20.523.900	31	20.523.900	31	20.523.900	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	636.840.674	2	636.840.674	2	636.840.674	2	636.840.674	2	636.840.674	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-		-		-		-		-	
Keg. Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	31	Lap	31	883.765.500	31	883.765.500	31	892.765.500	31	883.765.500	31	883.765.500	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9	Lap	10	44.342.000	10	44.342.000	10	44.342.000	10	44.342.000	10	44.342.000	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	KI	9	659.423.500	9	649.423.500	9	658.423.500	9	649.423.500	9	649.423.500	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10	Pkt	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					14.216.046.289		8.062.152.783		9.227.735.714		12.439.030.853		12.797.887.859	
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	100	%	100	1.752.274.832	100	1.133.234.241	100	1.651.646.727	100	2.334.880.968	100	1.651.646.727	
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran	100	%	100	1.662.312.932	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.662.312.932	100	1.000.000.000	
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	133	%	100	1.289.466.599	100	1.083.358.599	100	1.083.358.599	100	1.289.466.599	100	1.083.358.599	
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	100	2.988.401.800	100	2.708.713.800	100	2.988.401.800	100	3.388.401.800	100	2.988.401.800	
	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	100	643.457.000	100	643.457.000	100	643.457.000	100	643.457.000	100	643.457.000	
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	135	%	100	6.532.100	100	6.532.100	100	6.532.100	100	56.532.100	100	6.532.100	
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD	117	%	85	5.873.601.026	85	1.486.857.043	85	1.854.339.488	85	3.063.979.454	85	5.424.491.633	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan														
Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD kurun waktu 1 th	44		18	1.752.274.832	18	1.133.234.241	18	1.651.646.727	18	2.334.880.968	18	1.651.646.727	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah kurun waktu 1 th	17	Dok	3	423.974.444	3	150.000.000	3	423.974.444	3	423.974.444	3	423.974.444	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kurun waktu 1 th	18	Dok	9	850.628.105	9	600.000.000	9	600.000.000	9	1.200.000.000	9	600.000.000	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan kurun waktu 1 th	6	Dok	4	394.438.042	4	150.000.000	4	394.438.042	4	394.438.042	4	394.438.042	



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi kurun waktu 1 th	1,6	Dok	2	83.234.241	2	83.234.241	2	83.234.241	2	83.234.241	2	83.234.241	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD kurun waktu 1 th	5	Dok	0		0		0		0	83.234.241	0		
Sosialisasi Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		0		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan														
Keg.Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran kurun waktu 1 th	44	Dok	5	1.662.312.932	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.662.312.932	5	1.000.000.000	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS kurun waktu 1 th	10	Dok	1	414.089.771	1	200.000.000	1	200.000.000	1	414.089.771	1	200.000.000	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS kurun waktu 1 th	8	Dok	1	435.747.530	1	200.000.000	1	200.000.000	1	435.747.530	1	200.000.000	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD kurun waktu 1 th	7	Dok	1	207.363.206	1	200.000.000	1	200.000.000	1	207.363.206	1	200.000.000	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan kurun waktu 1 th	10	Dok	1	200.511.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.511.000	1	200.000.000	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD kurun waktu 1 th	9	Dok	1	404.601.425	1	200.000.000	1	200.000.000	1	404.601.425	1	200.000.000	
Meningkatnya Kualitas Rekomendasi DPRD														



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah kurun waktu 1 th	81	Lap	11	1.289.466.599	11	1.083.358.599	11	1.083.358.599	11	1.289.466.599	11	1.083.358.599	
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan kegiatan fasilitasi pembahasan pengawasan pemerintahan kurun waktu 1 th	13	Lap	2	171.603.727	2	171.603.727	2	171.603.727	2	171.603.727	2	171.603.727	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur kurun waktu 1 th	21	Lap	2	171.386.349	2	171.386.349	2	171.386.349	2	171.386.349	2	171.386.349	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kurun waktu 1 th	21	Lap	2	171.001.348	2	171.001.348	2	171.001.348	2	171.001.348	2	171.001.348	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian kurun waktu 1 th	13	Lap	2	170.759.175	2	170.759.175	2	170.759.175	2	170.759.175	2	170.759.175	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK kurun waktu 1 th	8	Lap	2	198.608.000	2	198.608.000	2	198.608.000	2	198.608.000	2	198.608.000	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPj kurun waktu 1 th	5	Lap	1	406.108.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	406.108.000	1	200.000.000	
Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD														
Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD kurun waktu 1 th	6	Dok	36	2.988.401.800	36	2.708.713.800	36	2.988.401.800	36	3.388.401.800	48	2.988.401.800	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD kurun waktu 1 th	1	Dok		0		-		-	1 Dok	400.000.000		-	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD kurun waktu 1 th	6	Dok	6	2.318.042.500	6	2.318.042.500	6	2.318.042.500	6	2.318.042.500	6	2.318.042.500	



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli kurun waktu 1 th	0	Dok	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga fraksi /bulan kurun waktu 1 th	8	Org/bkn	7	165.939.000	7	165.939.000	7	165.939.000	7	165.939.000	7	165.939.000	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD kurun waktu 1 th	1	Dok	1	4.732.300	1	4.732.300	1	4.732.300	1	4.732.300	13	4.732.300	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan kurun waktu 1 th	15	Dok	18	479.688.000	18	200.000.000	18	479.688.000	18	479.688.000	18	479.688.000	
Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat														
Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat kurun waktu 1 th	3	Dok	6	643.457.000	6	643.457.000	6	643.457.000	6	643.457.000	6	643.457.000	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD kurun waktu 1 th	1	Lap	1	13.396.000	1	13.396.000	1	13.396.000	1	13.396.000	1	13.396.000	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok pokok Pikiran DPRD yang disusun kurun waktu 1 th	1	Dok	2	6.354.000	2	6.354.000	2	6.354.000	2	6.354.000	2	6.354.000	
Pelaksanaan Reses	Frekuensi Reses DPRD kurun waktu 1 th	2	KI	3	623.707.000	3	623.707.000	3	623.707.000	3	623.707.000	3	623.707.000	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD														
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD kurun waktu 1 th	9	Dok	10	6.532.100	10	6.532.100	10	6.532.100	10	56.532.100	10	6.532.100	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD kurun waktu 1 th	7	KI	2		2		2		2	50.000.000	2		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik kurun waktu 1 th	2	Lap	8	6.532.100	8	6.532.100	8	6.532.100	8	6.532.100	8	6.532.100	
Peningkatan Kualitas Tugas DPRD														



BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024												KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Keg. Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD kurun waktu 1 th	3	Dok	41	5.873.601.026	41	1.486.857.043	41	1.854.339.488	41	3.063.979.454	41	5.424.491.633	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD kurun waktu 1 th	27	Dok	20	4.053.550.127	20	1.012.421.290	20	1.379.903.735	20	1.892.013.376	20	4.820.055.880	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Bamusy kurun waktu 1 th	14	Dok	6	404.435.753	6	404.435.753	6	404.435.753	6	404.435.753	6	404.435.753	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD kurun waktu 1 th	92	Dok	15	1.415.615.146	15	70.000.000	15	70.000.000	15	767.530.325	15	200.000.000	
TOTAL					55.081.307.105		49.784.469.099		51.860.527.530		55.071.822.669		55.430.679.675	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Sekretariat DPRD terdapat dua program yang mendukung pembangunan daerah dimana ada satu program prioritas yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam program penunjang terdapat sembilan kegiatan dan 28 Sub kegiatan yang mendukungnya



Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA IMPLEMENTASI
1	2	3	4	5
1.	“NGELAYANI BIROKRASINE” PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Mendampingi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akselerasi Reformasi Birokrasi
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bapemperda
			Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Menyiapkan Draft Raperda
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi penyusunan naskah akademik oleh mitra/tenaga ahli
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA IMPLEMENTASI
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran oleh Badan Anggaran dan TAPD
			Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	
			Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Meningkatnya Kualitas Rekomendasi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi Rapat Kerja dan Audiensi dengan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	



NO	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA IMPLEMENTASI
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Fasilitasi Penguatan SDM DPRD
			Sub Kegiatan Orientasi DPRD	
			Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	
			Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	
		Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pengelolaan hasil reses, pokok-pokok pikiran DPRD



NO	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA IMPLEMENTASI
			Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Fasilitasi Rapat Badan Kehormatan terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD
			Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	
		Peningkatan Kualitas Tugas DPRD	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi rapat-rapat Alkep, risalah dan dokumentasi sidang
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	



Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa walaupun program pada Sekretariat DPRD tidak ada program prioritas dalam mendukung Sapta Cipta akan tetapi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dimana terdapat tujuh outcome yang terbagi dalam tujuh kegiatan dan 32 sub kegiatan ada didalamnya secara tidak langsung mendukung program prioritas, secara ringkas rencana implementasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- i. Mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bapemperda;
- ii. Fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran oleh Badan Anggaran dan TAPD
- iii. Fasilitasi Penguatan SDM DPRD
- iv. Pengelolaan hasil reses, pokok-pokok pikiran DPRD
- v. Fasilitasi Rapat Badan Kehormatan terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD.
- vi. Fasilitasi rapat-rapat Alkep, Risalah dan dokumentasi sidang



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BDANG URUSAN

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

NO	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya fasilitas layanan lembaga DPRD		Nilai AKIP	Nilai	64,31	65,03					Periode Renstra RPD 2025-2026
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			88,30	88,74	89,18	88,62	Periode Renstra PD 2025-2029
2.		Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitas layanan produk-produk hukum daerah	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	



Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD dilihat dari aspek indikator kinerja utama dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah ditargetkan tercapai 100% dengan rumusan persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama tetap berlandaskan pada tinjauan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penentuan target keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Magelang. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas kinerja dan pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penetapan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah periode tahun 2025-2029, yang secara khusus diperuntukkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintahan daerah. Penentuan target kinerja penyelenggara urusan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 hanya ada beberapa urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan keuangan), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum.

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai perangkat daerah pemangku urusan Kesekretariatan memiliki Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Akan tetapi tidak memiliki Indeks Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Magelang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Magelang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Magelang 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.



Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, diharapkan seluruh jajaran terdorong untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kegiatan secara efektif di tahun-tahun mendatang, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Magelang, 19 September 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Magelang

Drs. ARI HANDOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031001